

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tantangan pembangunan pertanian dalam menghadapi era globalisasi adalah kenyataan bahwa pertanian Indonesia didominasi oleh usaha kecil yang dilaksanakan oleh berjuta-juta pelaku utama bidang pertanian, perikanan dan kehutanan berlahan sempit, bermodal kecil dan memiliki produktifitas yang rendah. Kondisi ini memberi dampak yang kurang menguntungkan terhadap persaingan di pasar global. Oleh karena itu diperlukan upaya khusus pemberdayaan melalui penyuluhan pertanian yang dapat membantu dan memfasilitasi pelaku utama untuk memperbaiki kehidupan dan penghidupannya serta meningkatkan kesejahteraannya.

Penyuluhan pada dasarnya adalah kegiatan profesional pelayanan jasa pendidikan pembangunan yang bermartabat yaitu yang menghargai sisi humanisme masyarakat (Sumardjo, 2010). Fokus utama penyuluhan adalah pengembangan kapital manusia sebagai bagian dari sistem sosial. Penyuluhan melakukan upaya pembangunan struktur masyarakat secara konvergen, dialogis, demokratis, dan partisipatif, sehingga masyarakat di Indonesia yang pernah terjajah lama, yang apatis dan tergantung pada campur tangan pihak lain (*dependent*), lalu bergeser ke masyarakat subsistem (*independent*), dan berkembang menjadi masyarakat yang mandiri (*interdependent*). Perkembangan semacam ini sejalan dengan konsep Covey (1996) tentang perkembangan perilaku manusia (Sumardjo, 2010).

Penyuluh pertanian sebagai fasilitator harus memiliki kompetensi dalam memahami dan menguasai konsep andragogi. Keberhasilan seorang penyuluh ditentukan oleh kompetensinya dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh petani, baik teknologi budidaya, harga, akses pasar dan permodalan maupun kebijakan pembangunan pertanian di wilayah kerjanya. Untuk itu penyuluh harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, berpengetahuan luas, bersikap mandiri dan mampu menempatkan dirinya sesuai dengan karakteristik petani. Dalam hubungan ini penyuluh harus memiliki kemampuan menyusun rencana pembelajaran yang akan

diimplementasikan melalui metode dan media pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai dengan jumlah kebutuhan masyarakat.

Kompetensi penyuluh pertanian diuraikan pada tugas pokok dan fungsi seorang penyuluh dalam membantu petani mengembangkan usahanya, karena kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki penyuluh, baik kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial. Kompetensi penyuluh pertanian perlu didukung dengan kemampuan intelektual (*cognitif*), kemampuan yang berkaitan dengan kejiwaan (*affectif*) dan kemampuan gerak fisik (*psychomotoric*). Dengan adanya kompetensi seorang penyuluh diharapkan mampu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik dalam menyelenggarakan penyuluhan pertanian. Kenyataan di lapangan masih banyak penyuluh pertanian memiliki kompetensi yang rendah dalam melaksanakan tugasnya sebagai agen perubahan di bidang pembangunan pertanian. Kenyataan ini dipengaruhi oleh berbagai kebijakan di bidang pertanian yang menuntut seorang penyuluh bekerja bukan pada bidang yang ditekuninya.

Dalam konteks penyuluhan, ada dua pihak yang perlu dikembangkan kapital manusianya yaitu tenaga penyuluh dan warga masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan. Pertama, human kapital penyuluh setidaknya meliputi kompetensi-kompetensi berikut ini : (1) personal, (2) sosial, (3) andragogik, dan (4) komunikasi inovatif. Kompetensi personal adalah kesesuaian sifat bawaan dan kepribadian penyuluh yang tercermin dari kemampuan membawakan diri, kepemimpinan, kesantunan, motif berprestasi, kepedulian, disiplin, terpercaya, tanggung jawab dan ciri kepribadian penyuluh lainnya. Kompetensi sosial menyangkut kemampuan-kemampuan berinteraksi, berhubungan sosial, melayani, bermitra, bekerjasama dan bersinergi, mengembangkan kesetiakawanan, kohesif dan mampu saling percaya mempercayai. Kompetensi andragogik menyangkut kemampuan metodik dan teknik pembelajaran/ mengembangkan pengalaman belajar untuk mempengaruhi dan merubah pengetahuan/wawasan, keterampilan/tindakan dan sikap (minat) sasaran penyuluhan, membangkitkan kebutuhan belajar/berubah, menyadari tanggung jawab dan kebutuhan sasaran penyuluhan. Kompetensi komunikasi inovatif menyangkut reaktualisasi diri, penguasaan teknologi informasi, kemampuan

berempati, kemampuan komunikasi partisipatif/konvergensi, menggali dan mengembangkan pembaharuan, serta kewiraswastaan (*interpreneurship*).

Penyuluhan telah menjadi bidang kajian ilmiah dan penyuluh pertanian telah menjadi tenaga fungsional. Sehingga profesionalisme perlu dikembangkan dikalangan penyuluhan pertanian. Alasan lain akan diperlukannya profesionalisme tersebut adalah bahwa tugas penyuluhan pertanian di masa mendatang akan semakin luas, intensif dan kompleks, serta dilain pihak para petani semakin pandai dan maju, beragam dan canggih. Para petani pun perlu dibina usahatani dalam berbagai bentuk pengorganisasian, yang semuanya perlu penanganan secara profesional. Selain itu tugas penyuluhan dimasa depan akan sangat berbeda dengan yang selama ini biasa dilakukan. Cakupan tugas-tugasnya akan jauh lebih luas, bukan terbatas pada penyuluhan peningkatan produksi, tapi juga penyuluhan usahatani, pengolahan hasil dan pemasaran, serta pengorganisasian masyarakat petani dalam berbagai bentuk wadah dan untuk berbagai tujuan. Kemampuan-kemampuan profesional di bidang-bidang itu perlu dikuasai penyuluh pertanian masa depan. Selain itu spesialisasi dalam lingkup tugas penyuluhan pertanian perlu terus dikembangkan. Bukan hanya atas dasar jenis komoditi pertanian yang ditangani, tetapi juga spesialisasi atas dasar fungsi tugas. Misalnya spesialis dalam merakit dan mengemas informasi dan teknologi, spesialis dalam produksi informasi, spesialis dalam pengorganisasian petani dan lain sebagainya sesuai dengan perkembangan kebutuhan nyata di lapangan. Untuk alasan-alasan itulah diperlukan peningkatan kemampuan profesionalisme penyuluh pertanian.

Pekerjaan penyuluhan pertanian merupakan profesi yang menuntut ketekunan, keuletan, disiplin, komitmen dan irama kerja yang pasti, karena pekerjaan itu melibatkan secara langsung pihak-pihak lain. Untuk bisa melibatkan seluruh dirinya beserta keahlian dan keterampilannya demi keberhasilan pekerjaannya, maka orang profesional harus mampu mempunyai disiplin kerja yang tinggi. Prilaku profesional selalu dalam kerangka moral dan pertanggung jawaban, integritas moral, kredibilitas dan hormat pada orang lain, merupakan konsep sentral prilaku profesional (Hendry, 1990 *dalam* Slamet, 2003)

Salah satu pendekatan yang dilakukan dalam kegiatan penyuluhan adalah pendekatan kelompok yang dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan penyuluhan. Pendekatan kelompok juga dimaksudkan untuk mendorong penumbuhan kelembagaan petani (kelompoktani, gabungan kelompoktani). Hal ini dilakukan karena masih banyaknya jumlah petani yang belum bergabung dalam kelompoktani (poktan), terbatasnya jumlah tenaga penyuluh pertanian sebagai fasilitator, serta terbatasnya pembiayaan dalam pembinaan bagi poktan dan gabungan kelompoktani (gapoktan).

Penyuluhan adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk mengubah pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotorik) masyarakat (petani), agar tercapai kesejahteraan masyarakat (petani), terjadi perubahan ekonomi dan pertanian yang berkelanjutan. (Lumintang, 2003)

Menurut Fraire (1985) dalam Gayo Taring (2012), pendidikan yang paling sesuai untuk petani sebagai orang dewasa adalah pendidikan partisipatif dengan metode andragogi atau pendidikan orang dewasa, bersifat non formal, dengan proses pembelajaran dalam lingkungan usahatani setempat. Ajaran inti andragogi adalah bahwa pendidikan bukanlah sekedar pangalihan informasi buku dari guru ke murid, melainkan kegiatan menggerakkan proses belajar dalam rangka memecahkan masalah. Istilah andragogi yang banyak dipakai adalah “fasilitator” dan “narasumber” sebagai pengganti “guru”, “memfasilitasi proses belajar” sebagai pengganti “mengajar”, “warga belajar” sebagai pengganti murid atau siswa” dan sebagainya.

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan kabupaten yang memiliki jumlah penyuluh pertanian terbanyak di Sumatera Barat yaitu sebanyak 245 orang penyuluh yang terdiri dari 51 orang penyuluh pertanian PNS, 79 orang penyuluh THL-TB PP dan 116 orang penyuluh swadaya. Masing-masing penyuluh pertanian khususnya penyuluh PNS dan THL-TB PP membina minimal 16 kelompoktani di setiap nagari. Jumlah keltan yang ada saat ini adalah sebanyak 1.319 keltan. Dari jumlah total kelompoktani tersebut, 62.32% merupakan kelompoktani dengan kelas pemula, 28,05% adalah kelas lanjut, 2.28% adalah kelas madya, 0.076 % adalah kelas utama kelas utama dan 7.05% adalah

kelompoktani yang belum diketahui kelas kelompoknya. Data penyuluh dan kelompoktani tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 1. Data Penyuluh Pertanian PNS, THL-TB PP dan penyuluh Swadaya di Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kecamatan/BP3K	Jumlah Penyuluh Pertanian (orang)			Jumlah
		Penyuluh PNS	THL-TB PP	Penyuluh Swadaya	
1.	Kab. Lima Puluh Kota	6	0	0	6
2.	Akabiluru	4	6	7	17
3.	Bukik Barisan	3	6	9	18
4.	Guguak	4	4	6	14
5.	Gunuang Omeh	2	4	12	18
6.	Harau	5	7	9	21
7.	Kapur IX	1	15	7	23
8.	Lareh Sago Halaban	5	6	10	21
9.	Luak	4	4	7	14
10.	Mungka	5	4	14	23
11.	Pangkalan	1	8	5	14
12.	Payakumbuh	4	6	14	24
13.	Situjuah Limo Nagari	4	5	9	18
14.	Suliki	3	4	7	14
Jumlah		51	79	116	246

Sumber : Data Simluhtan, Februari 2017.

Tabel 2. Data Kelompoktani di Kabupaten Lima Puluh Kota

Kecamatan/BP3K	Jumlah Kelompoktani					Belum diketahui
	Jumlah	Kelas Pemula	Kelas Lanjut	Kelas Madya	Kelas Utama	
1.	Akabiluru	110	80	30	0	0
2.	Bukik Barisan	173	99	72	2	0
3.	Guguak	105	63	32	9	0
4.	Gunuang Omeh	98	59	31	0	6
5.	Harau	147	107	39	0	1
6.	Kapur IX	124	89	29	0	5
7.	Lareh Sago Halaban	112	82	26	4	0
8.	Luak	83	7	9	1	65
9.	Mungka	59	35	22	2	0
10.	Pangkalan	39	27	12	0	0
11.	Payakumbuh	111	77	19	3	12
12.	Situjuah Limo Nagari	78	42	33	3	0
13.	Suliki	80	56	16	5	3
Jumlah		1.319	822	370	29	93

Sumber : Data Simluhtan, Februari 2017

Dari data diatas dapat dilihat bahwa lebih dari separoh kelompok tani yang ada belum terjadi peningkatan kelas kelompok tani. Untuk itu diperlukan penyuluh dengan tingkat kompetensi yang lebih tinggi agar pembinaan yang dilakukan dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat penerima manfaat. Pembinaan kepada kelompok tani bertujuan agar terjadi perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap dari anggota kelompok tani yang pada akhirnya akan merubah tingkat kemampuan kelompok tani itu sendiri sebagai suatu organisasi.

B. Rumusan Masalah

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi sumberdaya alam penyuluh yang terbanyak, akan tetapi dihadapkan dengan permasalahan masih rendahnya tingkat kelas kemampuan kelompok tani. Fakta yang terjadi dilapangan, 62,32% dari jumlah kelompok tani yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah kelompok tani pemula. Sedangkan di Kecamatan Lareh Sago Halaban jumlah kelompok tani pemula mencapai 73,21%. Kelas kemampuan kelompok tani sangat berkaitan erat dengan kompetensi yang dimiliki oleh penyuluh dan kerjasama yang baik serta hubungan emosional yang dekat antara penyuluh dan kelompok tani binaannya.

Sejak tahun 2012, Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian (BP4K) telah mengeuarkan sistem registrasi kelompok tani, namun register kelompok tersebut tidak berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas kelompok tani, tetapi dengan adanya register justru sebagian besar kelompok melakukan registrasi kelompok tani untuk melengkapi syarat memperoleh bantuan dan program pemerintah. Melihat kondisi ini, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak agar permasalahan-permasalahan kelompok tani dapat diminimalisir dan tujuan akhir dari penyuluhan yaitu perubahan perilaku dan peningkatan kesejahteraan petani dapat terwujud.

Tujuan utama dari penyuluhan adalah untuk merubah pengetahuan, keterampilan dan sikap pelaku utama. Namun kenyataan dilapangan yang terjadi adalah tujuan penyuluhan seolah hanya terbatas pada peningkatan produksi komoditas strategis. Berbagai kegiatan dan program diluncurkan ke masyarakat tani dalam hal ini adalah kelompok tani dengan berbagai metode. Namun program

tersebut tidak selalu sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan oleh petani. Sehingga tingkat adopsi maupun aplikasi petani hanya sebatas pada waktu pelaksanaan program, setelah itu mereka akan kembali kepada kebiasaan lama. Melihat kondisi tersebut, peneliti merasa perlu adanya teknik atau cara yang harus dimiliki oleh seorang penyuluh dalam menggali kebutuhan dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di tingkat petani dengan memperhatikan proses pembelajaran orang dewasa. Karena pada umumnya petani yang tergabung kedalam kelompok tani adalah orang-orang dewasa yang memiliki karakteristik emosional yang cenderung tidak mau digurui.

Sejalan dengan hal tersebut, keberadaan penyuluh di tengah-tengah kelompok tani dinilai sangat lemah. Jumlah ketenagaan penyuluh PNS lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penyuluh THL-TB PP dan swadaya yang terdiri dari 20,73% penyuluh PNS, 32,11% penyuluh THL-TB PP dan 47,16% penyuluh swadaya. Pelaksana kegiatan penyuluhan yang berkaitan dengan program pemerintah dilapangan didominasi oleh PNS dan THL-TB PP dengan menempatkan 1 orang penyuluh disetiap nagari. Namun sebaran dan jumlah penyuluh THL-TB PP lebih banyak dibandingkan dengan penyuluh PNS. Sehingga tugas utama penyuluh THL-TB PP yang awalnya adalah sebagai tenaga bantu pelaksanaan tugas penyuluh PNS dalam rangka mensukseskan Program Nasional P2BN, berubah menjadi ujung tombak keberhasilan program pemerintah di wilayah kerja masing-masing. Sementara untuk penyuluh swadaya melakukan kegiatan penyuluhan secara swadaya dan perorangan saja. Untuk itu perlu rasanya di kaji lebih dalam tentang kompetensi andragogi penyuluh PNS dan THL-TB PP dalam memfasilitasi kelompok tani.

Sebagian besar penyuluh belum sepenuhnya mampu memahami prinsip dan proses belajar orang dewasa yang seharusnya berlangsung dalam kegiatan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan pada umumnya berlangsung ketika ada bantuan atau program pada satu kelompok tani dengan materi dan metoda ditentukan oleh penyuluh, bukan berdasarkan kepada kebutuhan dan permasalahan yang dirasakan petani.

Salah satu kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang usaha sektor pertaniannya berpeluang dan berpotensi untuk dikembangkan adalah Kecamatan

Lareh Sago Halaban. Menurut data Simluhtan Kabupaten Lima Puluh Kota (2017), Kecamatan Lareh Sago Halaban didominasi oleh lahan pertanian terutama komoditi jagung seluas 1.207 Ha yang merupakan kawasan sentra jagung terluas, komoditi padi seluas 2.862 Ha. Selain itu Kecamatan Lareh Sago Halaban juga merupakan kawasan usaha peternakan sapi terbesar di Kabupaten LimaPuluh Kota dengan populasi ternak sapi sebanyak 10.253 ekor. Dengan potensi yang dimiliki tersebut, jumlah penyuluh dirasa sudah sesuai dengan yang diharapkan yaitu 1 orang penyuluh disetiap nagari. Namun permasalahan yang dirasakan saat ini adalah kegiatan penyuluhan lebih banyak pada proses pelayanan bukan mendidik petani agar mampu mengambil keputusan sendiri. Oleh karena itu, tantangan penyuluhan saat ini semakin besar. Untuk itu, sangat diperlukan peran aktif penyuluh pertanian sebagai pengarah dan fasilitator guna meluruskan tujuan dari kelompok tani itu sendiri dan mampu merubah perilaku petani khususnya anggota kelompok tani.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sejauhmana tingkat kompetensi andragogi penyuluh pertanian di Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota dilihat dari perspektif anggota kelompok tani
2. Bagaimana tingkat kompetensi andragogi penyuluh pertanian PNS, dan THL-TB PP di Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten LimaPuluh Kota.

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan tingkat kompetensi andragogi penyuluh pertanian di Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota dilihat dari perspektif anggota kelompok tani
2. Membandingkan tingkat kompetensi andragogi penyuluh pertanian PNS dan THL-TB PP di Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten LimaPuluh Kota.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat ilmiah yaitu bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu penyuluhan dan komunikasi pembangunan, khususnya penyuluhan pembangunan.
2. Manfaat praktis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat bagi pengambil kebijakan bila timbul masalah yang berkaitan dengan kompetensi penyuluh pertanian dan pengembangan kelompok tani.

